



**Kementerian PPN/
Bappenas**

RAPAT FGD
**“ Kegiatan Survey Perspektif
Stakeholders Terhadap UU 25/2004
tentang SPPN”**

**HOTEL GUMAYA
SEMARANG
Kamis, 16 Mei 2013**

Latar Belakang Kegiatan



UNDANG- UNDANG 25 TAHUN 2004

1

Landasan Hukum di Bidang Perencanaan Pembangunan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga Perencanaan Pembangunan Nasional dapat disusun secara Sistematis, Terarah, Terpadu, Menyeluruh dan Tanggap terhadap perubahan

2

Sudah berjalan 8 tahun dan melibatkan banyak *stakeholders*

3

Perlu dilakukan evaluasi sehingga diketahui kendala dan hambatan



Tujuan Kegiatan

Melihat kembali pada tujuan kegiatan adalah untuk mendapatkan :

1. informasi perspektif *stakeholders* terhadap UU 25/2004;
2. Informasi mengenai implementasi UU 25/2004 + kendala + permasalahan;
3. Solusi dan saran.

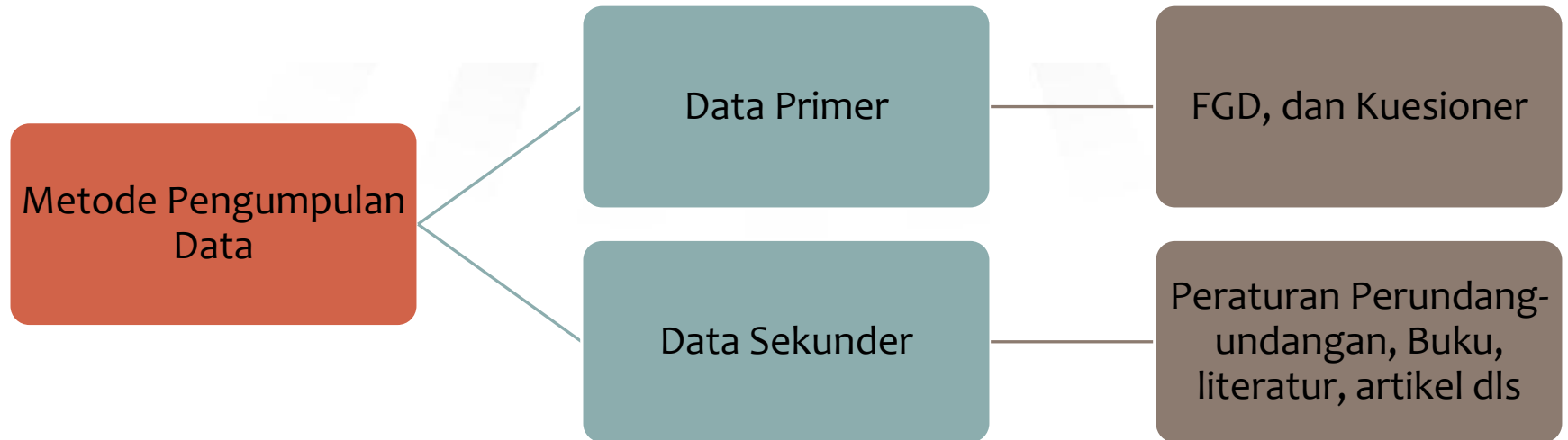
OUTPUT

DISKUSI DAN
ISIAN KUESIONER

HAMBATAN,
SOLUSI DAN
SARAN DALAM
PELAKSANAAN
UU 25/2004

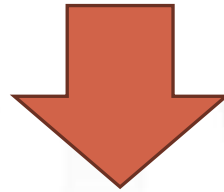
EFEKTIFITAS
PELAKSANAAN
UU 25/2004

Metode Pengumpulan Data



Alat Analisa

Melalui Metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology*)



Diharapkan akan mendapatkan perspektif *stakeholders* terhadap pelaksanaan UU 25/2004

ROCCIPI

RULE	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah urutan pasal sudah sistematis? • Apakah peraturan turunan amanat UU SPPN sudah lengkap? • Apakah masih diperlukan aturan teknis/operasional lainnya? • Apakah ada pasal yang tidak jelas? • Apakah ada pasal yang bertentangan dengan pasal lainnya?
OPPORTUNITY	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah mekanisme UU SPPN memberatkan <i>stakeholders</i>?
CAPACITY	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah instansi melakukan kegiatan peningkatan kompetensi staf? • Apakah aturan waktu dalam proses penyusunan dan penetapan yang diatur dalam UU 25/2004 dapat dilaksanakan?
COMMUNICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dilakukan? • Bimbingan teknis dilakukan? • <i>Stakeholders</i> memiliki akses untuk memberikan <i>feedback</i>?
INTEREST	Apakah UU 25/2004 memberikan dampak positif bagi kepentingan instansi?
PROCESS	Apakah proses penyusunan dan penetapan perencanaan sudah baik dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan?
IDEOLOGY	<i>Stakeholders</i> yakin SPPN diperlukan?

AGENDA FGD

1. Arahan dan paparan dari Bapak Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
2. Paparan mengenai arti penting sinergitas perencanaan dan penganggaran;
3. Paparan mengenai efektifitas pelaksanaan UU 25/2004 di daerah;
4. Diskusi;
5. Pengisian kuesioner.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

* Download Materi

<http://birohukum.bappenas.go.id>

* Saran dan Masukan

Email : biro.hukum@bappenas.go.id